

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN
(Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri)**

Riskiki Putrananta Pratama

Moch. Dzulkirrom AR

Zahro Z.A.

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

Email: riskikipratama52@gmail.com

ABSTRACT

Payroll accounting system is closely related to internal control to minimize the problems and find solutions appropriate. The aim of this study was to analysis the payroll accounting system that existed at the Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri and is already improving existing internal controls. Results of this study concluded that the existing payroll system at the Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri is good enough. This is proved by the documents and records used in the payroll system is already contains all the necessary information. However, there are still some weaknesses, there is duplicate functions between the manufacturer and payroll functions. In addition, in the employees acceptance are not in accordance with the required fields. Existing weaknesses could lead to problems in the payroll system so that internal control can not be achieved. Therefore, need a improvements so that internal control can be improved.

Keyword : *Accounting System, Wage and Payroll System, Internal Controlling*

ABSTRAK

Sistem akuntansi penggajian berhubungan erat dengan pengendalian intern untuk meminimalisir masalah serta menemukan pemecahan masalah yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem akuntansi penggajian yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri dan apakah sudah meningkatkan pengendalian intern yang sudah ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penggajian yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem penggajian sudah sesuai memuat seluruh informasi yang dibutuhkan. Tetapi, masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu masih adanya perangkapan fungsi antara fungsi pembuat dan pembayaran gaji. Selain itu, dalam penerimaan karyawan masih ada yang tidak sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Kelemahan-kelemahan yang ada dapat memicu adanya masalah-masalah dalam sistem penggajian sehingga pengendalian intern tidak dapat tercapai. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan dan pembenahan agar pengendalian intern dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: *Sistem Akuntansi, Sistem Penggajian, Pengendalian intern*

PENDAHULUAN

Persaingan antar perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi masyarakat, baik barang maupun jasa. Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, salah satunya yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan di Indonesia masih sangat kurang. Untuk meminimalisir keadaan tersebut tiap perusahaan harus memiliki suatu sistem untuk mencapai tujuan perusahaan.

Salah satu sistem yang dimiliki perusahaan adalah sistem akuntansi. Suatu sistem yang baik direncanakan untuk menghasilkan sebuah informasi terutama berhubungan dengan aktivitas keuangan. Informasi tersebut digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan dan memudahkan untuk menelusuri sumber permasalahan yang ada di dalam perusahaan serta menemukan pemecahan masalah yang tepat.

Pencapaian tujuan perusahaan memerlukan adanya karyawan yang merupakan salah satu aset perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas perusahaan. Kontribusi yang diberikan berupa pikiran, tenaga, maupun keahlian yang dimiliki dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Kontribusi yang sudah diberikan hendaknya mendapat kompensasi dari perusahaan atas kinerja karyawan. Kompensasi yang diberikan perusahaan dapat berupa gaji. Pemberian gaji yang sesuai dapat mendorong kinerja karyawan menjadi lebih baik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa gaji adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Penetapan gaji di Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1996.

Gaji merupakan unsur terbesar yang memerlukan ketelitian dalam penempatan, penggolongan, pencatatan serta pembayarannya. Permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian gaji, salah satunya adalah penyalahgunaan oleh pihak tertentu sehingga muncul kecurangan dan

penyelewengan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem akuntansi penggajian.

Sistem akuntansi penggajian sangatlah berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan. Keberadaan sistem akuntansi penggajian merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pengendalian intern perusahaan. Apabila sistem akuntansi penggajian yang dimiliki perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka pengendalian intern perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik pula.

Objek penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yang berstatus sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pada penelitian ini peneliti masih menemukan beberapa kelemahan yang terdapat pada sistem akuntansi penggajian yang termasuk dalam unsur pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya sistem pengendalian intern dalam pemberian gaji kepada karyawan. Maka pada penulisan skripsi ini peniliti mengambil judul:

“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri)”

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi perusahaan dapat berubah seiringan dengan perkembangan perusahaan. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2008:3). Informasi tersebut terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan. Fungsi dari adanya sistem akuntansi menurut Cole dalam Baridwan (2009:3) adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan keseragaman dalam menangani transaksi sejenis sehingga mendapatkan informasi yang akurat
- b. Menciptakan efisiensi kerja
- c. Memudahkan manajemen mengelola perusahaan.

Gaji

Gaji adalah pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan yang dilakukan perusahaan setiap bulan (Sujarwени, 2015:127). Penggajian diatur oleh pemerintah, sehingga

kesalahan akan dikenakan teguran dan sanksi dari pemerintah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1996. Pembayaran gaji telah ditetapkan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berbeda-beda antar setiap kota. Menurut Sutrisno (2009:190), faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaji antara lain:

- a. Tingkat biaya hidup
Kompensasi atau gaji yang diterima karyawan digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum (KFM). Kebutuhan karyawan yang tinggal di kota jauh akan berbeda dengan yang tinggal di kota kecil.
- b. Tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain
Kompensasi yang berlaku di perusahaan lain untuk macam kegiatan yang sama biasanya berbeda.
- c. Tingkat kemampuan perusahaan
Perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan dapat membiayai tingkat kompensasi karyawan yang tinggi pula dan sebaliknya.
- d. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab
Jenis pekerjaan yang lebih sulit dan dengan tanggung jawab yang lebih besar, tentu akan diimbangi dengan tingkat kompensasi yang lebih besar pula dan sebaliknya.
- e. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
Setiap perusahaan akan selalu terikat dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pula tingkat kompensasi yang diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum (KFM) karyawan.
- f. Peranan serikat buruh
Serikat buruh merupakan jembatan penghubung antara kepentingan para karyawan dengan kepentingan perusahaan.

Sistem Akuntansi Penggajian

Sistem akuntansi penggajian adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberi gaji kepada para karyawannya atas jasa-jasa yang mereka berikan (Sujarweni, 2015:127). Sistem akuntansi penggajian terdiri dari dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, fungsi yang terkait, dan jaringan prosedur yang membentuk sistem. Setiap dokumen serta catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian harus dapat memberikan informasi yang akurat. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian terdiri dari fungsi kepegawaian, fungsi pencatatan waktu, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian

terdiri dari prosedur pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji, distribusi biaya gaji, pembuatan bukti kas keluar dan pembayaran gaji.

Pengendalian Intern

Hery (2007:195) mengatakan pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan. Tujuan perusahaan membuat sistem pengendalian intern adalah:

- a. Untuk menjaga kekayaan organisasi
- b. Untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan
- c. Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan
- d. Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen
- e. Agar semua lapisan yang ada di perusahaan tunduk pada hukum dan aturan yang sudah ditetapkan di perusahaan (Sujarweni, 2015:69).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diperoleh dengan jalan mengumpulkan data, yang kemudian disusun, diklarifikasi, dianalisis, serta diinterpretasikan secara sistematis sesuai dengan fakta dan objek yang diteliti. Lokasi penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi penggajian karyawan
 - a. Dokumen yang digunakan
 - b. Catatan akuntansi yang digunakan
 - c. Fungsi yang terkait
 - d. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian
2. Sistem Pengendalian Intern
 - a. Struktur organisasi
 - b. Sistem otorisasi
 - c. Prosedur pencatatan
 - d. Praktek yang sehat
 - e. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sistem penggajian yang ada sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang membuat pengendalian intern masih belum berjalan dengan baik.

1. Sistem Akuntansi Penggajian

a. Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Akuntansi Penggajian

Dokumen yang digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sudah baik, terbukti bahwa semua dokumen yang terkait telah memberikan informasi yang berkenaan dengan penggajian karyawan.

b. Catatan yang Digunakan Dalam Sistem Akuntansi Penggajian

Pencatatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi penggajian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sudah baik. Dapat dilihat dengan adanya buku kas, buku bank dan jurnal telah memuat semua informasi dan transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan termasuk pembayaran gaji. Catatan-catatan akuntansi yang digunakan juga telah diarsipkan dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*.

c. Fungsi yang Terkait Dalam Sistem Akuntansi Penggajian

Fungsi yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi penggajian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sudah cukup baik namun masih terdapat kelemahan yaitu perangkapan pekerjaan, yaitu fungsi pembuat daftar gaji merangkap sebagai fungsi pembayaran gaji yang dilakukan oleh Bagian Keuangan. Perangkapan tugas dapat mengakibatkan menurunnya efektivitas kinerja karyawan karena tanggung jawab yang harus diselesaikan terlalu banyak.

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Akuntansi Penggajian

Jaringan prosedur penggajian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sudah cukup baik dan mendapatkan otorisasi dari bagian-bagian terkait. Pencatatan waktu hadir telah menggunakan mesin *finger print* dan absen secara manual. Namun pada prosedur penggajian yang bertugas sebagai fungsi pencatatan dan

pembayaran diotorisasi oleh satu bagian, yaitu Bagian Keuangan. Perangkapan fungsi tersebut sebaiknya dihindari dengan cara menambahkan sub bagian baru.

2. Sistem Pengendalian Intern

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik akan berdampak pada pengendalian intern yang baik pula karena telah memisah tanggung jawab masing-masing fungsi. Salah satu fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri masih merangkap dalam pencatatan sekaligus membayar gaji karyawan, yaitu Bagian Keuangan. Perangkapan fungsi yang terjadi dapat menghambat adanya pengendalian intern.

b. Sistem Otorisasi

Sistem otorisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yang ada sudah berjalan dengan baik. Adanya otorisasi dari pihak yang memiliki wewenang untuk mengotorisasi memudahkan pengendalian intern terutama transaksi pembayaran gaji.

c. Prosedur Pencatatan

Semua pencatatan yang telah dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yang berhubungan dengan penggajian sudah baik karena telah diteliti kebenarannya oleh pihak yang berwenang. Setiap catatan-catatan disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

d. Praktek yang Sehat

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri masih belum melakukan praktek yang sehat karena belum menyertakan formulir bennomor cetak dalam struk penggajian. Tetapi dalam pembuatan daftar gaji dan absensi sudah diverifikasi kebenaran dan ketelitiannya oleh pihak Bagian Kasubbag Program dan Keuangan.

e. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Karyawan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan bidang dan tanggung jawab yang dibutuhkan. Semua penerimaan diotorisasi langsung oleh pusat Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata tidak memiliki otoritas penuh dan hanya menempatkan pada posisi yang lowong.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh peneliti pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri terhadap sistem penggajian dan pengendalian intern, peneliti menyimpulkan masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki guna meningkatkan pengendalian intern. Penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Sistem Penggajian

- a. Dokumen yang digunakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yang terdiri dari dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan daftar upah, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, surat pernyataan gaji dan upah, amplop gaji dan upah, bukti kas keluar sudah baik dalam memberikan informasi yang berkenaan dengan penggajian karyawan.
- b. Catatan-catatan yang digunakan dalam proses pemberian gaji sudah cukup baik karena telah memuat seluruh informasi yang dibutuhkan. Catatan-catatan yang digunakan juga telah disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- c. Terdapat kelemahan pada fungsi yang terkait karena adanya perangkapan fungsi antara fungsi kepegawaian dengan fungsi pencatatan waktu yang diotorisasi oleh Bagian Kepegawaian dan fungsi pembuat daftar gaji dengan fungsi pembayar gaji yang diotorisasi oleh Bagian Keuangan.
- d. Sistem penggajian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut adalah perangkapan fungsi Bagian Keuangan yang merangkap sebagai pembuat daftar gaji sekaligus membayarkan kepada karyawan.

2. Sistem Pengendalian Intern

- a. Organisasi pada struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sudah menggambarkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang cukup baik kepada karyawan, namun terdapat kelemahan yaitu adanya perangkapan fungsi. Lowongnya Bagian Akuntansi pada perusahaan mengakibatkan Bagian

Keuangan merangkap fungsi tersebut untuk melakukan tugas-tugasnya mulai dari membuat daftar gaji hingga memberikan gaji kepada karyawan.

- b. Setiap transaksi yang dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri telah didasarkan pada otorisasi dari pihak yang berwenang.
- c. Sistem pengendalian intern pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri sudah cukup baik dalam prosedur pencatatan gaji karena sudah diverifikasi oleh bagian yang terkait, namun pada proses pembayaran gaji karyawan belum menyertakan formulir bermotor cetak. Hal ini memungkinkan adanya kesulitan dalam pencarian dokumen.
- d. Penerimaan karyawan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri masih ada beberapa karyawan yang tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, peneliti memberikan saran atau rekomendasi untuk dijadikan pertimbangan dan perbaikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengendalian intern, sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Bagian pembuat daftar gaji harus terpisah dari bagian yang melakukan pembayaran gaji kepada karyawan agar pengendalian intern perusahaan dapat tercapai. Sebaiknya perusahaan menambahkan sub bagian baru yaitu Bagian Akuntansi.
2. Pada struktur organisasi sebaiknya ditambahkan sub bagian baru, yaitu Bagian Akuntansi untuk menghindari adanya perangkapan tugas. Bagian Akuntansi bertugas sebagai pembuat daftar gaji, sedangkan Bagian Keuangan bertugas membayarkan kepada karyawan.
3. Bagian Keuangan menyertakan nomor urut yang tercetak pada tiap dokumen, khususnya dalam pembayaran gaji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam pemberian struk gaji yang akan dibagikan kepada karyawan.
4. Bagian Kepegawaian dalam penerimaan karyawan seharusnya mengajukan surat permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai dengan bidang yang

dibutuhkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri. Hal ini dapat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung kinerja yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi: Penyususan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPFE

Hery. 2007. *Siklus Akuntansi Perusahaan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*: Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013. *Jaminan Kesehatan*

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sutrisno, H. Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group

Upah Minimum Regional. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1996